

PEMBINAAN LEMBAGA PENGELOLA KONSERVASI DESA TENTANG KEMITRAAN KONSERVASI

Hamka^{1*}, Hamzari², Abdul Hapid³

^{1,2,3}Universitas Tadulako

hamka@untad.ac.id¹, hpalaguna@yahoo.com, hafid.untad@gmail.com³

Received: 08-12-2024

Revised: 20-12-204

Approved: 30-12-204

ABSTRAK

Kemitraan konservasi merupakan salah satu pendekatan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian akses pemanfaatan potensi Taman Nasional secara berkelanjutan khususnya pada zona tradisional. Dasar kegiatan pengabdian dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan lembaga pengelola konservasi desa dalam memanfaatkan zona tradisional taman nasional lore lindu. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan kantor Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang di hadiri oleh pengurus dan anggota lembaga pengelola konservasi desa sekitar 15 orang anggota yang ada pada Kelompok. Mitra Target dari kegiatan ini lembaga pengelola konservasi desa Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Dalam pelaksanaannya dilakukan penyuluhan tentang kemitraan konsevasi, penyusunan rencana kerja tahunan, dan pelatihan penggunaan avenza maps. Hasil pengabdian memberikan tambahan pengetahuan bagi pengurus dan anggota LPKD terutama dalam peningkatan kapasitas mereka dalam menyusun rencana kerja LPKD dan penggunaan avenza map dalam melakukan pemanfaatan di zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu sesuai dengan penjanjian kerjasama yang antara Kepala Desa Bunga dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

Kata Kunci : Partnership, Conservation, Community

PENDAHULUAN

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah pada ketinggian bervariasi antara 200 – 2.610 m dpl dengan luas 215,733,70 Ha yang ditetapkan melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun dasar pertimbangan penetapan Lore Lindu sebagai Taman Nasional adalah dikarenakan adanya potensi yang menonjol seperti tumbuhan langka yang endemik, merupakan habitat satwa migran, ekosistem yang khas berpotensi wisata berupa gejala alam atau keunikan alam serta budaya dan adat istiadat masyarakat, juga sebagai daerah tangkapan air bagi sumber air di sekitarnya (Gunawan et al., 2013).

Keberhasilan suatu pengelolaan kawasan konservasi sedikit banyak sangat tergantung dari peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan, terutama dalam meminimalkan gangguan kawasan (Najmi et al., 2020). Untuk itu diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada pasal 49 bahwa Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui: a) pengembangan desa konservasi; b. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam (Prayitno, 2020a).

Skema kemitraan konservasi merupakan salah satu pendekatan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian akses pemanfaatan potensi Taman Nasional secara berkelanjutan khususnya pada zona tradisional, kemitraan konservasi diharapkan menjadi solusi dalam konflik tenurial kawasan (Prayitno,

2020b). Desa Bunga adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Luas wilayah administrasi Desa Bunga adalah 23,64 Km², berada pada ketinggian 640 m dari permukaan laut, daerah dataran yakni 60%, perbukitan 25% dan pegunungan 15%. Desa Bunga memiliki zona tradisional seluas 139,4 Ha yang bisa dimanfaatkan melalui skema kemitraan konservasi sehingga melibatkan para pihak (Alif et al., 2020).

Kepala Desa Bunga telah menandatangani perjanjian kerja dengan kepala balai taman nasional lore lindu tentang penguatan fungsi kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budidaya tradisional di zona tradisional dan telah terbentuk Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) berdasarkan SK Nomor. 04.38/KD-B/SKU/IV/2021 sebagai pengelola zona tradisional Desa Bunga Kecamatan Palolo kabupaten Sigi.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan terungkap bahwa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pengelola Konservasi Desa adalah kurangnya pengetahuan tentang lokasi zona tradisional dan apa saja yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam pengelolaan zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu yang berada di Desa Bunga. Permasalahan prioritas yang akan ditangani dalam program PKM adalah penyuluhan dan pendampingan tentang pemanfaatan zona tradisional Desa Bunga dan Pelatihan Sistem Informasi Geografi (penggunaan avenza maps).

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dan pelatihan. Metode Penyuluhan merupakan cara dan prosedur yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada mitra pengabdian agar terjadi perubahan sikap perilaku sebagai mana yang diharapkan (Nurlaili & Wahjuti, 2018), faktor kompetensi dan intensitas penyuluhan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi kelompok tani (Suyadi et al., 2019). Kegiatan penyuluhan ini dilakukan kantor Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang di hadiri oleh pengurus dan anggota lembaga pengelola konservasi desa sekitar 15 orang anggota yang ada pada Kelompok Mitra. Kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan cara penyampaian materi dan praktek langsung dilapangan. Berikut ini adalah alur kegiatan pengabdian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dihadiri pengurus dan anggota lembaga pengelola konservasi desa (LPKD) Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota LPKD tentang kesepakatan konservasi masyarakat, penyusunan rencana kerja tahunan. Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan di kantor Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang juga dihadiri pemerintah Desa. Kegiatan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu yang ada di Desa Bunga.

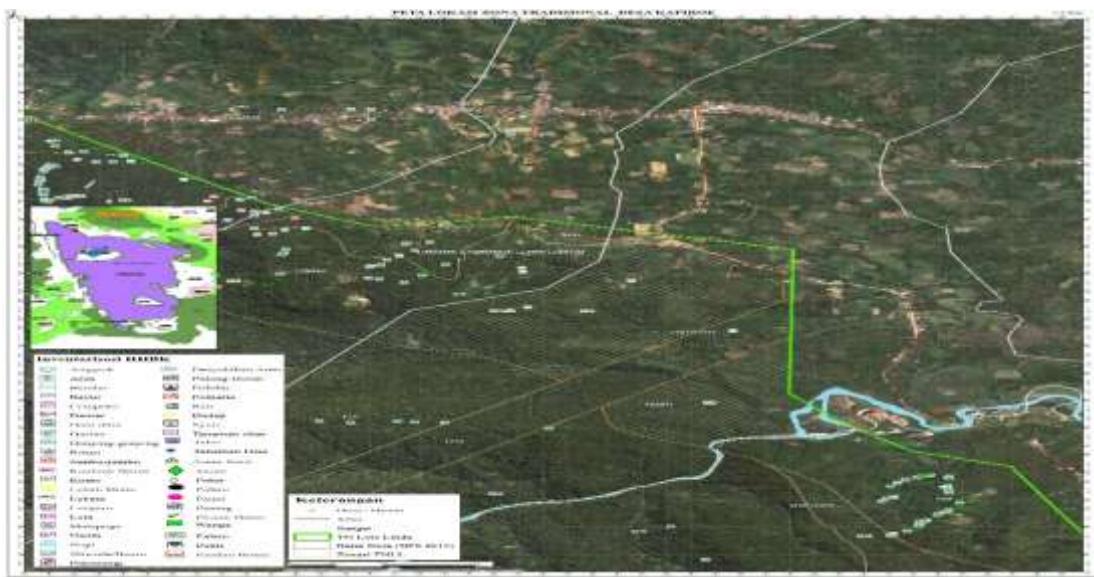


Gambar 1.
Pelaksanaan Penyuluhan

Materi penyuluhan yang diberikan yaitu berkaitan dengan pemberian akses terbatas kepada LPKD yang bisa dimanfaatkan di zona tradisional seperti pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional (yang tidak dilindungi), pemanfaatan sumber daya perairan terbatas (yang tidak dilindungi), elain itu juga diberikan materi tentang bagaimana Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selama kegiatan penyuluhan berlangsung peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam sesi diskusi. Sejak awal penyuluhan, banyak pengurus dan anggota yang menunjukkan rasa ingin tahu dan semangat dalam memahami materi yang disampaikan.

Selaian itu dilakukan kegiatan pelatihan penggunaan Avenza Map dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan dimulai dengan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti wifi, peta kerja dan HP dari masing – masing peserta, penting untuk menganalisis latar belakang peserta agar materi dapat disesuaikan, baik untuk pemula maupun yang berpengalaman (Kurniawati et al., 2024).



Gambar 2.

Peta Kerja Pelatihan Avenza Map

2. Tahap penyampaian materi dilakukan secara sistematis mulai konsep dasar penggunaan avenza map, instalasi aplikasi sampai bagaimana menjalankan avenza map, selain materi juga diberikan modul pelatihan dan video tutorial yang disusun dengan baik sehingga dapat digunakan dengan mudah. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan penyampaian materi dan langsung dipraktekkan peserta dan didampingi langsung oleh tutor sehingga peserta mendapatkan penjelasan secara detail (Hamka et al., 2023). Selain itu dilakukan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat bertanya langsung mengenai materi yang kurang jelas sehingga dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.



Gambar 3.

Penggunaan Avenza Map

3. Tahap evaluasi pelatihan dimana peserta diberikan kuesioner untuk mengukur kepuasan peserta dan pemahaman peserta dengan materi yang diberikan.

Dengan cara ini memberikan gambaran tentang keberhasilan kegiatan pelatihan.

Kegiatan pengabdian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi pengurus dan anggota LPKD terutama dalam peningkatan kapasitas mereka dalam menyusun rencana kerja LPKD dan penggunaan avenza map dalam melakukan pemanfaatan di zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu sesuai dengan penjanjian kerjasama yang antara Kepala Desa Bunga dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Fatmiah et al., 2022).

Berdasarkan hasil evaluasi data kuesioner yang telah disebar kepada seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat, terdapat peningkatan kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. Responden menyatakan sangat puas terhadap layanan yang diberikan oleh panitia selama kegiatan berlangsung. Kepuasan ini tercermin dari respons positif yang diberikan oleh responden pada hampir semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Hasil evaluasi kuesioner diikuti oleh 15 responden menunjukkan tingkat kepuasan yang baik di kalangan peserta. Sebanyak 67% responden Puas dengan Informasi kegiatan pada saat pelaksanaan, 64% dari responden merasa puas dengan materi dan modul pelatihan yang disampaikan, 70 % peserta puas dengan sarana dan prasarana yang digunakan selama kegiatan. Sebanyak 75% merasa bahwa kegiatan ini meningkatkan pengetahuan mereka. Selain itu, 66% responden menyatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan keterampilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar, kegiatan penyuluhan dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota LPKD dalam pemanfaatan zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu terutama dalam penyusunan rencana kerja dan penggunaan avenza map.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M., Sahide, K., Fisher, M., Nasri, N., Dharmiasih, W., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). Land Use Policy Anticipating a new conservation bureaucracy ? Land and power in Indonesia 's Essential Ecosystem Area policy. *Land Use Policy*, 97(December 2019), 104789. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104789>
- Fatmiah, F., Abdullah, A., & Nurliani, N. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 6(2), 47–54. <https://doi.org/10.33096/AGROTEK.V6I2.235>
- Gunawan, H., Bismark, M., & Krisnawati, H. (2013). Kajian sosial ekonomi masyarakat sekitar sebagai dasar penetapan tipe penyangga Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 10(2), 103–119.
- Hamka, H., Maiwa, A., Hapid, A., Muthmainnah, M., & Pribadi, H. (2023). Pembinaan Kelompok Tani Sintuvu Roso Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 5(2), 164–171. <https://doi.org/10.35970/MADANI.V5I2.1840>

- Kurniawati, L., Utami, L. A., Oktaviana, S., & Putri, S. A. (2024). Pelatihan Ai Image Generator Untuk Pembuatan Konten Media Sosial Bagi Remaja Islam Al Hikmah. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(6), 1597–1606. <https://doi.org/10.59407/JPKI2.V2I6.1397>
- Najmi, N., Suriani, M., Rahmi, M. M., Islama, D., & Nasution, M. A. (2020). Peran Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh. *Jurnal Perikanan Tropis*, 7(1), 73–84.
- Nurlaili, N., & Wahjuti, U. (2018). Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Malang. *AGRIEKSTENSI: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian*, 17(1), 37–50.
- Prayitno, D. E. (2020a). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Hukum Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Prayitno, D. E. (2020b). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209.
- Suyadi, S., Zaim, U., & Tjitropranoto, P. (2019). Pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran kepemimpinan informal di lingkungan taman nasional Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 25–41.